CULTOURE JURNAL ILMIAH PARIWISATA BUDAYA HINDU
e-ISSN: 2745-7915
p-ISSN: 2745-7923

ANALISIS IMPLEMENTASI *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI DESA WISATA TIGAWASA, KABUPATEN BULELENG

Luh Lely Suryani[1], **Gede Janardana**[2], **Luh Dharmayanti**[3], **Ida Bagus Ari Surya Artha**[4]
lely88surya@gmail.com
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Indonesia

Abstract

This study analyzes the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) in sustainable tourism management in Tigawasa Tourism Village, Buleleng Regency, by positioning Tri Hita Karana as a local perspective for understanding sustainable development practices within the Bali Aga community. The study employs a qualitative descriptive approach with a case study design. Data were collected through semi-structured interviews with local stakeholders, document analysis, and a literature review, and were analyzed through data reduction, data display, conclusion drawing, and source triangulation. The analysis focuses on SDGs 8, 11, 12, 15, and 17, which address decent work and economic growth, sustainable communities, responsible consumption and production, life on land, and partnerships for the goals, respectively. The findings indicate that SDG implementation in Tigawasa Tourism Village has developed through the strengthening of bamboo-based livelihoods, the conservation of customary forests and traditional spatial arrangements, the application of customary norms in natural resource utilization, and the development of collaboration among stakeholders. Tri Hita Karana functions as a local value framework that connects ecological, social, economic, and spiritual dimensions in tourism management practices. However, these efforts have not yet been fully supported by standardized sustainability monitoring systems, optimal digital promotion, and stronger pentahelix partnerships involving businesses, academics, and media. This study demonstrates that strengthening customary institutions and integrating Tri Hita Karana principles into tourism planning can serve as a strategy for localizing the SDGs while enhancing the sustainability of Tigawasa Tourism Village.

Keywords: Sustainable Development Goals, sustainable tourism, Tri Hita Karana, tourism village, Tigawasa, Bali Aga.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Desa Wisata Tigawasa, Kabupaten Buleleng, dengan menempatkan Tri Hita Karana sebagai perspektif lokal dalam memahami praktik pembangunan berkelanjutan masyarakat Bali Aga. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pemangku kepentingan lokal, studi dokumen, dan telaah pustaka, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta triangulasi sumber. Analisis difokuskan pada SDGs 8, 11, 12, 15, dan 17 yang berkaitan dengan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, permukiman berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, ekosistem daratan, serta kemitraan untuk mencapai tujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SDGs di Desa Wisata Tigawasa telah berkembang melalui penguatan ekonomi berbasis kerajinan bambu, pelestarian hutan adat dan tata ruang tradisional, penerapan norma adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, serta pengembangan kemitraan antarpemangku kepentingan. Tri Hita Karana berperan sebagai kerangka nilai yang menghubungkan dimensi ekologis, sosial, ekonomi, dan spiritual dalam praktik pengelolaan pariwisata. Namun, implementasi tersebut belum sepenuhnya didukung oleh sistem pemantauan indikator keberlanjutan

yang terstandar, promosi digital yang optimal, dan kemitraan pentahelix yang melibatkan dunia usaha, akademisi, serta media secara lebih intensif. Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan adat dan integrasi prinsip Tri Hita Karana ke dalam perencanaan pariwisata dapat menjadi strategi untuk melokalkan SDGs sekaligus memperkuat keberlanjutan Desa Wisata Tigawasa.
Kata kunci: Sustainable Development Goals, pariwisata berkelanjutan, Tri Hita Karana, desa wisata, Tigawasa, Bali Aga.

1. Pendahuluan

Pariwisata berkelanjutan kini menjadi paradigma utama dalam pembangunan kepariwisataan global, sejalan dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berbagai kajian menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian SDGs, terutama pada dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga indikator keberlanjutan pariwisata perlu dipetakan secara sistematis agar kontribusinya terhadap tujuan pembangunan global dapat terukur (Rasoolimanesh et al., 2020; Miller & Torres-Delgado, 2023). Di Indonesia, salah satu instrumen kebijakan yang mendukung agenda tersebut adalah pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal, yang diyakini dapat mendorong pemerataan ekonomi sekaligus pelestarian budaya dan lingkungan di tingkat pedesaan (Dewi, 2013; Achmad et al., 2023).

Provinsi Bali sebagai destinasi wisata utama Indonesia memiliki karakteristik unik dalam mendukung pariwisata berkelanjutan, yakni filosofi *Tri Hita Karana* yang menekankan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa filosofi ini berfungsi sebagai kerangka tata kelola lokal yang memperkuat partisipasi masyarakat, konservasi lingkungan, dan pelestarian budaya dalam praktik kepariwisataan di Bali (Adityanandana & Gerber, 2019; Sitohang & Purnomo, 2023; Wiryawan & Ernawati, 2024). Namun, sejumlah kajian juga menyoroti adanya paradoks dalam penerapan *Tri Hita Karana*: di satu sisi nilai ini dipromosikan sebagai keunggulan budaya, tetapi di sisi lain implementasinya pada level operasional pariwisata masih menghadapi tantangan, seperti persoalan sampah dan ketidakseimbangan distribusi manfaat ekonomi (Sitohang & Purnomo, 2023; Misnan & Sukma, 2023).

Sebagian besar perhatian akademik dan kebijakan terhadap pariwisata berkelanjutan di Bali masih terkonsentrasi di kawasan Bali selatan, seperti Ubud, Gianyar, dan Badung, sementara kawasan Bali utara-khususnya Kabupaten Buleleng-relatif kurang mendapat sorotan meskipun memiliki potensi budaya yang tidak kalah kaya (Ary Widiastini, 2015; Pratiwi et al., 2024). Salah satu desa di Buleleng yang menyimpan kekayaan budaya tersebut adalah Desa Tigawasa, di Kecamatan Banjar, yang merupakan salah satu permukiman *Bali Aga* tertua bersama Sidatapa, Cempaga, Pedawa, dan Banyuseri-yang secara kolektif dikenal dengan akronim SCTPB (Armiyati et al., 2023). Desa-desa *Bali Aga* ini memiliki ciri khas arsitektur, tata krama adat, dan sistem kepercayaan yang berbeda dari masyarakat Bali Majapahit pada umumnya, sehingga berpotensi besar sebagai daya tarik wisata budaya otentik (Rahmi, 2025; Armiyati et al., 2023).

Tigawasa memiliki luas wilayah sekitar 1.690 hektare yang membentang dari kawasan pegunungan pada ketinggian 500-700 meter di atas permukaan laut hingga pesisir pantai di Tukad Cebol, mencakup pula kampung Bunut Panggang, Bingin Banjah, dan Labuan Aji. Secara historis, desa ini dikenal sebagai penghasil kerajinan anyaman bambu serta memiliki tradisi penguburan

jenazah tanpa kremasi yang berbeda dari kebiasaan masyarakat Bali pada umumnya, di samping tradisi *Meboros Kidang* (berburu rusa) yang dilaksanakan menjelang *Nyepi Desa*. Keunikan tersebut, ditambah dengan keberadaan hutan adat dan lanskap perbukitan yang masih asri, menjadikan Tigawasa memiliki modal sosial-ekologis yang relevan dengan berbagai dimensi SDGs, mulai dari pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (Tujuan 8), permukiman dan komunitas berkelanjutan (Tujuan 11), konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (Tujuan 12), hingga ekosistem daratan (Tujuan 15). Meskipun demikian, status Tigawasa dalam basis data desa wisata nasional masih berada pada klasifikasi 'berkembang', dengan keterbatasan fasilitas, homestay, dan paket wisata yang terdokumentasi secara resmi, sehingga potensi yang dimiliki belum sepenuhnya terkonversi menjadi manfaat ekonomi dan keberlanjutan yang optimal.

Kesenjangan antara potensi budaya-ekologis yang besar dan tingkat pemanfaatan wisata yang masih rendah inilah yang melatarbelakangi pentingnya penelitian ini. Berbagai studi terdahulu mengenai desa wisata di Bali umumnya menyoroti dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan pariwisata secara umum (Herlianti & Sanjaya, 2022; Andayani et al., 2017), peran modal sosial dan partisipasi masyarakat (Prayitno et al., 2024; Dewi, 2013), maupun penguatan model *pentahelix* dalam tata kelola pariwisata budaya (Widhiasthini et al., 2025). Namun, kajian yang secara spesifik memetakan implementasi indikator SDGs pada desa wisata *Bali Aga* seperti Tigawasa, dengan mengintegrasikan kerangka lokal *Tri Hita Karana* sebagai instrumen pendukung pencapaian SDGs, masih sangat terbatas. Hal ini menjadi kesenjangan teoretis yang penting untuk diisi, mengingat desa-desa *Bali Aga* memiliki karakter tata kelola sumber daya berbasis adat yang berpotensi menjadi model alternatif keberlanjutan di luar kerangka pariwisata massal (Suamba et al., 2023; Ardana et al., 2024).

Urgensi penelitian ini juga didukung oleh kenyataan bahwa indikator-indikator keberlanjutan pariwisata yang dikembangkan secara global, sebagaimana ditinjau secara sistematis oleh Rasoolimanesh et al. (2020) dan diperbarui oleh Miller dan Torres-Delgado (2023), membutuhkan kontekstualisasi pada level destinasi mikro seperti desa wisata agar dapat diukur dan diterapkan secara operasional. Sementara itu, kajian bibliometrik terbaru menegaskan bahwa riset pariwisata berkelanjutan terus berkembang pesat secara global, namun studi pada destinasi pedesaan dengan kekhasan etnis tertentu, seperti *Bali Aga*, relatif masih sedikit dieksplorasi dibandingkan destinasi arus utama (Loureiro et al., 2024). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan berupa pemetaan implementasi SDGs yang kontekstual pada desa wisata berbasis kearifan lokal, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan dalam merancang strategi pengelolaan pariwisata Tigawasa yang lebih berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi bentuk-bentuk implementasi indikator SDGs yang relevan dalam pengelolaan pariwisata di Desa Wisata Tigawasa; (2) menganalisis peran filosofi *Tri Hita Karana* sebagai kerangka lokal yang memperkuat pencapaian SDGs; dan (3) merumuskan tantangan serta strategi kolaboratif yang dapat mengakselerasi pengelolaan pariwisata berkelanjutan di desa tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi dokumen dan triangulasi pustaka dari sumber-sumber jurnal terindeks, yang akan diuraikan lebih lanjut pada bagian metode.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan

desain studi kasus pada Desa Wisata Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan Perbekel Desa Tigawasa, Ketua Pokdarwis, dan pengrajin anyaman bambu. Data sekunder diperoleh dari dokumen pemerintah, basis data desa wisata, laporan kelembagaan, serta artikel ilmiah yang relevan dengan SDGs, pariwisata berkelanjutan, dan kearifan lokal Bali. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan penelusuran pustaka. Validitas data diperkuat dengan teknik triangulasi sumber melalui perbandingan hasil wawancara, dokumen resmi, dan literatur ilmiah. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Unit analisis penelitian difokuskan pada implementasi SDGs dalam pengelolaan pariwisata Desa Wisata Tigawasa, khususnya Tujuan 8, 11, 12, 15, dan 17, serta peran filosofi Tri Hita Karana dalam mendukung pencapaiannya..

3. Pembahasan

3.1 Profil dan Karakteristik Desa Wisata Tigawasa

Desa Tigawasa terletak di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sekitar 24 kilometer ke arah barat Kota Singaraja, pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Secara etimologis, nama Tigawasa berasal dari kata ‘tiga’ dan ‘wasa’ yang merujuk pada tiga banjar utama pembentuk desa, yaitu Banjar Sanda, Banjar Pangus, dan Banjar Kuum Munggah. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 1.690 hektare yang membentang dari kawasan pegunungan hingga wilayah pesisir Tukad Cebol, serta mencakup wilayah Bunut Panggang, Bingin Banjah, dan Labuan Aji. Sebagai salah satu desa *Bali Aga* tertua di Buleleng bersama Sidatapa, Cempaga, Pedawa, dan Banyuseri (SCTPB), Tigawasa memiliki sejumlah keunikan budaya yang membedakannya dari masyarakat Bali Majapahit pada umumnya, antara lain sistem penguburan jenazah tanpa kremasi yang dipercaya berkaitan dengan kepercayaan *Dewa Swambu*, tradisi *Meboros Kidang* menjelang upacara *Nyepi Desa*, serta keterampilan anyaman bambu yang telah diwariskan secara turun-temurun (Armiyati et al., 2023; Rahmi, 2025).

Dalam basis data desa wisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Desa Wisata Tigawasa terdaftar dengan klasifikasi ‘berkembang’, yang menandakan bahwa pengelolaan kepariwisataannya masih dalam tahap pengembangan, dengan keterbatasan pada aspek fasilitas, homestay terverifikasi, dan paket wisata formal. Kondisi ini berbeda jauh dengan desa wisata di kawasan Bali selatan yang telah mencapai status ‘mandiri’, seperti Desa Wisata Melinggih Kelod di Gianyar (Widhiasthini et al., 2025; Diwyarthi et al., 2025). Ketimpangan status ini mencerminkan tantangan struktural pariwisata Bali utara secara umum, di mana promosi destinasi dan investasi infrastruktur masih relatif terkonsentrasi di Bali selatan (Ary Widiastini, 2015; Pratiwi et al., 2024).

Data resmi memperkuat gambaran ketimpangan tersebut secara kuantitatif. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara langsung ke Bali pada tahun 2024 mencapai 6.333.360 kunjungan, sementara wisatawan nusantara mencapai 10.120.786 perjalanan (BPS Provinsi Bali, 2025a). Namun, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali secara terbuka mengakui bahwa kunjungan wisatawan masih terkonsentrasi di Bali selatan, sementara destinasi di Bali utara seperti Pemuteran, Lovina, Amed, dan Tulamben ‘belum banyak dikunjungi wisatawan’ (Disparda Provinsi Bali, 2024). Untuk mengatasi ketimpangan ini, Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah pusat meluncurkan program redistribusi kunjungan

wisatawan '3B' yang secara eksplisit menyasar Bali Utara/Buleleng sebagai salah satu kawasan sasaran perluasan, bersama Bali Barat/Jembrana dan Banyuwangi (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2025, dalam Tempo.co, 2025). Data ini secara empiris mendukung klaim bahwa Tigawasa, sebagai bagian dari kawasan Buleleng, menghadapi tantangan struktural berupa rendahnya pangsa kunjungan dibandingkan destinasi di Bali selatan.

Beberapa perkembangan terbaru juga memperkuat posisi Tigawasa dalam dimensi tata kelola sumber daya alam dan ekonomi berbasis komunitas. Pertama, pada 6 Juni 2026, Menteri Kehutanan Republik Indonesia secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Hutan Adat kepada Masyarakat Hukum Adat (MHA) Desa Adat Tigawasa bersama Desa Adat Cempaga di Kabupaten Buleleng, sebagai bagian dari penyerahan 10 SK Hutan Adat seluas total 1.175 hektare untuk 4.938 kepala keluarga di tiga provinsi (Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, 2026). Pengajuan hutan adat Tigawasa sendiri telah diproses sejak tahun 2021 dengan luas areal hutan adat sekitar 109 hektare, dan telah melalui tahap verifikasi lapangan oleh tim lintas instansi pada Juli 2025 (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, 2025; Kecamatan Banjar, 2025). Kedua, dari sisi ekonomi kerajinan, Sentra Anyaman Bambu Desa Tigawasa telah ditetapkan sebagai salah satu Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Unggulan Kabupaten Buleleng, telah memiliki legalitas akta notaris, serta terdaftar pada Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan merek kolektif 'Karya Lestari' Katsari, dan memperoleh pelatihan peningkatan branding dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng pada Oktober 2024 (Disdagperinkopukm Kabupaten Buleleng, 2024). Ketiga, dari sisi ekologi-spiritual, masyarakat Tigawasa menjaga sembilan pura hutan tanpa bangunan fisik yang diatur secara ketat melalui awig-awig, termasuk larangan membuang limbah dan menebang pohon di sekitar area suci tersebut (Mongabay Indonesia, 2023).

3.2 Pemetaan Implementasi Indikator SDGs

Pemetaan implementasi SDGs dalam penelitian ini mengacu pada indikator global yang paling relevan dengan karakteristik Desa Wisata Tigawasa. Indikator yang digunakan meliputi SDG 8.9 (mendorong pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya serta produk lokal), SDG 11.4 (melindungi dan melestarikan warisan budaya dan alam dunia), SDG 12.8 (meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan), SDG 15.1 (menjamin konservasi, restorasi, dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan), serta SDG 17.17 (mendorong kemitraan yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil). Indikator-indikator tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengidentifikasi kesesuaian praktik pengelolaan pariwisata di Desa Wisata Tigawasa dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

Tabel 1. Pemetaan Implementasi SDGs di Desa Wisata Tigawasa

Tujuan SDGs	Indikator SDGs	Bukti di Desa Tigawasa	Kesenjangan/Tantangan
Tujuan 8	8.9 Pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mendukung produk lokal	Sentra IKM Anyaman Bambu berlegalitas notaris & HAKI merek kolektif 'Karya Lestari' Katsari; pelatihan branding Disdagperinkopukm Buleleng, Oktober 2024 (Disdagperinkopukm Kab. Buleleng, 2024)	Promosi digital & jangkauan pasar masih terbatas; belum ada paket wisata formal terdokumentasi di basis data desa wisata nasional

Tujuan SDGs	Indikator SDGs	Bukti di Desa Tigawasa	Kesenjangan/Tantangan
Tujuan 11	11.4 Perlindungan warisan budaya dan alam	Aturan adat mempertahankan rumah tradisional Saka Roras & tata letak hulu-teben sebagai bagian dari identitas Bali Aga (Armiyati et al., 2023; Rahmi, 2025)	Tekanan modernisasi bangunan; belum ada regulasi tata ruang adat yang terdokumentasi formal di tingkat kabupaten
Tujuan 12	12.8 Kesadaran dan praktik konsumsi-produksi berkelanjutan	Sembilan pura hutan tanpa bangunan fisik dengan awig-awig yang melarang pembuangan limbah dan penebangan pohon di area sakral (Mongabay Indonesia, 2023)	Aturan adat belum terstandardisasi dalam dokumen rencana pengelolaan sumber daya yang dapat dipantau
Tujuan 15	15.1 Konservasi ekosistem daratan dan hutan	SK Penetapan Hutan Adat MHA Desa Adat Tigawasa seluas ±109 hektare, resmi diserahkan Menteri Kehutanan 6 Juni 2026 setelah pengajuan sejak 2021 (Kementerian Kehutanan RI, 2026; DLH Kab. Buleleng, 2025)	Rencana Kelola Perhutanan Sosial pascapenetapan SK belum tersedia publik; kapasitas kelembagaan pengelolaan pascapenetapan masih perlu diperkuat
Tujuan 17	17.17 Kemitraan multipihak (pentahelix) untuk pembangunan berkelanjutan	Pendampingan oleh Yayasan Javlec untuk fasilitasi RKPS; koordinasi lintas instansi (DLH, BPN, KPH Bali Utara, Kecamatan Banjar) dalam verifikasi hutan adat (Javlec, 2025)	Pelibatan akademisi, pelaku bisnis pariwisata profesional, dan media masih minim dibanding mitra pemerintah/NGO

(Sumber: diolah dari berbagai dokumen resmi pemerintah dan literatur, 2026)

3.2.1 Tujuan 8; Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Aspek ekonomi dalam pengelolaan pariwisata Tigawasa terutama bertumpu pada usaha kerajinan anyaman bambu yang dikerjakan secara turun-temurun oleh masyarakat lokal. Sentra Anyaman Bambu Tigawasa telah memperoleh legalitas formal berupa akta notaris dan pendaftaran HAKI atas merek kolektif "Karya Lestari" Katsari, serta mendapat pembinaan rutin dan pelatihan peningkatan branding dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng (Disdagperinkopukm Kab. Buleleng, 2024).

Kondisi tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kadek Windayani selaku pengrajin anyaman bambu Desa Tigawasa. Ia menjelaskan bahwa keterampilan menganyam diwariskan secara turun-temurun dan hingga saat ini masih menjadi salah satu sumber penghasilan utama masyarakat desa. Menurutnya, sebagian besar pengrajin telah memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi, meskipun pemasaran masih didominasi oleh pelanggan tetap dan promosi dari mulut ke mulut. Ia juga mengungkapkan bahwa tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan akses pasar, kebutuhan inovasi desain produk, serta perlunya pelatihan pemasaran digital yang lebih intensif.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kerajinan bambu tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya lokal, tetapi juga sebagai sumber penghidupan masyarakat. Capaian kelembagaan yang dimiliki Sentra Anyaman Bambu Tigawasa sejalan dengan temuan penelitian pada berbagai desa wisata di Indonesia yang menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui usaha mikro berbasis potensi lokal mampu meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja masyarakat desa tanpa harus bergantung pada investasi skala besar (Herlianti & Sanjaya, 2022; Dwiyanti et al., 2023). Pola ini juga konsisten dengan prinsip community-

based tourism yang terbukti memperkuat kesejahteraan ekonomi masyarakat sembari menjaga kendali lokal atas sumber daya wisata, sebagaimana ditemukan pada studi Community-Based Tourism di Nglanggeran (Suyatna et al., 2024) dan Cisaat (Achmad et al., 2023).

Meskipun demikian, legalitas dan branding kelembagaan belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan jaringan distribusi pasar dan promosi digital yang memadai. Kondisi ini menyebabkan nilai tambah ekonomi dari kerajinan bambu Tigawasa belum optimal dibandingkan potensi pasar wisata budaya yang tersedia, sebuah persoalan yang juga ditemukan pada berbagai destinasi pariwisata pedesaan di Kabupaten Buleleng (Ary Widiastini, 2015). Oleh karena itu, penguatan kapasitas pemasaran dan perluasan akses pasar menjadi langkah penting untuk meningkatkan kontribusi sektor kerajinan terhadap kesejahteraan masyarakat.

3.2.2 Tujuan 11; Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Permukiman tradisional Tigawasa, dengan tata letak Bali Aga yang khas dan keberadaan rumah-rumah adat, merupakan aset penting bagi keberlanjutan permukiman berbasis budaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Perbekel Desa Tigawasa, I Made Suardamayasa, masyarakat masih mempertahankan keberadaan rumah adat Saka Roras sebagai bagian dari identitas budaya Bali Aga. Rumah adat tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga memiliki nilai spiritual karena digunakan dalam berbagai aktivitas adat dan keagamaan. Menurutnya, meskipun terdapat tekanan modernisasi dan kebutuhan pembangunan fasilitas pendukung pariwisata, masyarakat tetap berkomitmen menjaga keaslian bentuk dan tata ruang tradisional yang diwariskan secara turun-temurun.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelestarian permukiman tradisional masih menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Tigawasa. Secara konseptual, pola tata ruang desa Bali Aga umumnya mempertahankan konsep Tri Mandala yang membagi ruang menjadi area sakral, madya, dan profan, sebagaimana ditemukan pada studi arsitektur desa Bali Aga di Tenganan Pegringsingan (Rahmi, 2025) dan Pedawa (Armiyati et al., 2023). Pelestarian struktur permukiman semacam ini sejalan dengan indikator permukiman berkelanjutan dalam SDGs yang menekankan pentingnya perlindungan warisan budaya dan alam dalam perencanaan kawasan permukiman.

Namun demikian, sebagaimana ditemukan pada banyak desa wisata Bali Aga lainnya, tekanan modernisasi dan kebutuhan ekonomi masyarakat berpotensi mendorong perubahan fungsi maupun tampilan bangunan tradisional dari waktu ke waktu (Rahmi, 2025). Oleh karena itu, diperlukan regulasi tata ruang berbasis adat yang konsisten agar keaslian permukiman tradisional Tigawasa tetap terjaga di tengah perkembangan pariwisata.

3.2.3 Tujuan 12; Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Praktik produksi kerajinan bambu di Tigawasa pada dasarnya merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya alam lokal secara berkelanjutan. Bahan baku bambu diperoleh dari hutan dan lahan milik masyarakat sendiri sehingga proses produksi tidak bergantung pada eksploitasi sumber daya dari luar wilayah. Pemanfaatan bahan baku lokal tersebut turut mendukung keberlangsungan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kadek Windayani selaku pengrajin anyaman bambu Desa Tigawasa, sebagian besar bahan baku bambu yang digunakan berasal dari kebun milik masyarakat. Pemanfaatan bambu dilakukan berdasarkan aturan adat yang mengatur usia bambu yang boleh ditebang serta kewajiban melakukan penanaman

kembali. Menurutnya, masyarakat tidak menebang bambu secara sembarangan karena ketersediaan bahan baku harus tetap dijaga untuk memenuhi kebutuhan produksi pada masa mendatang. Selain itu, praktik pengelolaan tersebut juga merupakan bentuk penghormatan terhadap alam yang diwariskan secara turun-temurun.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Tigawasa telah menerapkan prinsip produksi yang bertanggung jawab melalui pengelolaan sumber daya lokal yang memperhatikan aspek keberlanjutan. Pola produksi berbasis bahan baku lokal semacam ini selaras dengan prinsip ekowisata yang menekankan keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan kelestarian sumber daya, sebagaimana dikemukakan dalam kajian nilai-nilai sosial pengembangan ekowisata di Kepulauan Kei (Suwasono et al., 2022).

Selain itu, tradisi adat seperti Meboros Kidang yang dilaksanakan secara terbatas dan terikat pada siklus upacara Nyepi Desa juga mencerminkan mekanisme kontrol konsumsi sumber daya alam berbasis norma adat. Tradisi tersebut secara fungsional berperan sebagai instrumen pembatasan eksploitasi berlebihan terhadap satwa liar di kawasan hutan adat. Dengan demikian, praktik produksi dan konsumsi masyarakat Tigawasa tidak hanya berorientasi pada kebutuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan sesuai dengan prinsip Tujuan 12 SDGs.

3.2.4 Tujuan 15; Ekosistem Daratan

Keberadaan hutan adat dan lanskap perbukitan di sekitar Tigawasa merupakan modal ekologis penting yang menopang keberlanjutan ekosistem daratan sekaligus mendukung aktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya. Pencapaian paling konkret pada dimensi ini adalah diterbitkannya Surat Keputusan Penetapan Hutan Adat oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia pada 6 Juni 2026 untuk Masyarakat Hukum Adat Desa Adat Tigawasa yang mencakup areal seluas kurang lebih 109 hektare. Penetapan tersebut merupakan hasil proses pengajuan dan verifikasi lapangan lintas instansi yang telah berlangsung sejak tahun 2021 (Kementerian Kehutanan RI, 2026; DLH Kab. Buleleng, 2025; Kecamatan Banjar, 2025).

Hasil wawancara dengan Perbekel Desa Tigawasa, I Made Suardamayasa, menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan hutan adat tidak hanya didasarkan pada regulasi formal, tetapi juga pada awig-awig yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat. Menurutnya, hutan adat dipandang sebagai warisan penting yang harus dijaga keberlanjutannya karena memiliki fungsi ekologis, sosial, budaya, dan spiritual bagi masyarakat. Oleh karena itu, berbagai aktivitas yang berpotensi merusak kawasan hutan dibatasi melalui aturan adat yang berlaku.

Pengakuan negara terhadap hutan adat tersebut menjadi bukti bahwa tata kelola sumber daya berbasis adat di Tigawasa telah memperoleh legitimasi formal. Kondisi ini sejalan dengan prinsip bahwa Masyarakat Hukum Adat berperan sebagai penjaga hutan yang efektif dalam menjaga kelestarian ekosistem (Kementerian Kehutanan RI, 2026). Pola tata kelola berbasis adat semacam ini juga memiliki kesamaan dengan praktik konservasi berbasis kearifan lokal yang ditemukan pada sistem subak di kawasan Warisan Budaya Dunia Catur Angga Batukaru, Tabanan (Suamba et al., 2023; Ardana et al., 2024), pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Adat Karolahan, Karangasem (Rideng et al., 2022), maupun konservasi terumbu karang berbasis Tri Hita Karana di Pantai Mengiat (Suryawan et al., 2024).

Meskipun demikian, dokumen Rencana Kelola Perhutanan Sosial pascapenetapan hutan adat belum tersedia secara publik. Kondisi ini menunjukkan

bahwa penguatan kapasitas kelembagaan adat dan penyusunan sistem pengelolaan yang lebih terstruktur masih menjadi agenda penting guna memastikan keberlanjutan pengelolaan hutan adat dalam jangka panjang.

3.2.5 Tujuan 17; Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Dimensi kemitraan menjadi salah satu aspek yang masih perlu diperkuat dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Tigawasa, meskipun pada sektor pengelolaan hutan adat telah menunjukkan praktik kolaborasi multipihak yang relatif maju. Proses verifikasi lapangan pengajuan hutan adat Tigawasa pada tahun 2025 melibatkan berbagai instansi pemerintah, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Badan Informasi Geospasial, Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, KPH Bali Utara, serta Kecamatan Banjar (Kecamatan Banjar, 2025; DLH Kab. Buleleng, 2025). Selain itu, Yayasan Javlec Indonesia turut memberikan pendampingan dalam penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial melalui dukungan pendanaan TERRA-CF dan BPDLH (Javlec, 2025).

Hasil wawancara dengan Perbekel Desa Tigawasa menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga adat, Pokdarwis, BUMDes, hingga kelompok pengrajin. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Pokdarwis Desa Tigawasa, I Wayan Sudarma. Ia menjelaskan bahwa koordinasi rutin dilakukan dengan pemerintah desa, lembaga adat, kelompok pengrajin, dan berbagai organisasi masyarakat lainnya untuk memastikan pengembangan pariwisata tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan nilai budaya lokal. Namun demikian, ia mengakui bahwa kerja sama dengan pelaku industri pariwisata profesional, akademisi, serta media promosi digital masih perlu diperluas guna meningkatkan daya saing destinasi wisata.

Temuan tersebut sejalan dengan kajian yang menunjukkan bahwa pencapaian SDGs dalam sektor pariwisata dan kehutanan sosial sangat ditentukan oleh sinergi multipihak antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media yang dikenal sebagai model pentahelix (Widhiasthini et al., 2025). Pada konteks desa wisata serupa di Gianyar, model ini terbukti mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan kunjungan wisatawan melalui pembagian peran yang jelas antarstakeholder (Diwyarthi et al., 2025). Selain itu, modal sosial berupa jaringan kepercayaan dan norma kerja sama antarwarga juga telah terbukti menjadi faktor penting dalam keberhasilan pariwisata berkelanjutan berbasis komunitas (Prayitno et al., 2024).

Meskipun demikian, kolaborasi multipihak di Tigawasa masih lebih banyak terkonsentrasi pada isu kehutanan dan lingkungan dibandingkan pengembangan pariwisata. Keterlibatan akademisi, pelaku bisnis pariwisata profesional, serta media promosi digital masih relatif terbatas sehingga perluasan kemitraan pentahelix menjadi salah satu prioritas strategis untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutan Desa Wisata Tigawasa di masa mendatang.

3.3 Peran Tri Hita Karana sebagai Kerangka Lokal Pendukung SDGs

Filosofi *Tri Hita Karana* yang menekankan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan (*parahyangan*), manusia dengan manusia (*pawongan*), dan manusia dengan alam (*palemahan*) berfungsi sebagai kerangka operasional yang relevan untuk mendukung pencapaian berbagai indikator SDGs di Tigawasa. Pada dimensi *palemahan*, praktik konservasi hutan adat dan pembatasan

pemanfaatan satwa liar mencerminkan keseimbangan ekologis yang selaras dengan Tujuan 15. Pada dimensi *pawongan*, solidaritas sosial dalam usaha kerajinan bambu berbasis komunitas mendukung Tujuan 8, sedangkan pada dimensi *parahyangan*, upacara-upacara adat yang mengatur siklus pemanfaatan sumber daya menjadi instrumen normatif yang mendukung Tujuan 12. Temuan ini memperkuat argumen sejumlah peneliti bahwa *Tri Hita Karana* dapat difungsikan sebagai kerangka tata kelola destinasi berbasis nilai lokal yang memperkuat partisipasi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam pariwisata Bali (Adityanandana & Gerber, 2019; Wiryawan & Ernawati, 2024). Relevansi filosofi ini juga ditegaskan dalam kajian model tanggung jawab sosial berbasis *Tri Hita Karana*, yang menunjukkan bahwa nilai keseimbangan tersebut dapat diadaptasi menjadi kerangka tata kelola tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi pelaku usaha maupun komunitas yang beroperasi di kawasan budaya Bali (Dewi et al., 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Perbekel Desa Tigawasa, I Made Suardamayasa, Tri Hita Karana dipahami sebagai pedoman hidup yang diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurutnya, prinsip Parahyangan diwujudkan melalui pelaksanaan upacara adat dan keagamaan yang rutin dilaksanakan di pura desa. Prinsip Pawongan tercermin dalam budaya gotong royong masyarakat, termasuk dalam aktivitas kelompok pengrajin bambu, Pokdarwis, serta berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya. Sementara itu, prinsip Palemahan diwujudkan melalui pengelolaan hutan adat, pemanfaatan bambu secara berkelanjutan, dan penerapan aturan adat yang mengatur hubungan masyarakat dengan lingkungan. Ia juga menegaskan bahwa nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam pengembangan pariwisata sehingga aktivitas wisata yang berkembang tetap menghormati budaya lokal dan menjaga kelestarian alam.

Meskipun demikian, sejumlah kajian mengingatkan bahwa penerapan *Tri Hita Karana* pada level operasional pariwisata tidak selalu berjalan tanpa kontradiksi. Penelitian pada destinasi pariwisata di Bali menemukan adanya fenomena dua sisi, di mana nilai *Tri Hita Karana* dipromosikan secara simbolis namun belum sepenuhnya mengatasi persoalan praktis seperti pengelolaan limbah dan ketidakseimbangan distribusi manfaat ekonomi antarwarga (Sitohang & Purnomo, 2023). Pengalaman ini menjadi pelajaran penting bagi Tigawasa agar penguatan *Tri Hita Karana* tidak berhenti pada tataran simbolik, tetapi diterjemahkan ke dalam aturan adat (*awig-awig*) dan mekanisme tata kelola yang konkret, misalnya melalui penetapan kuota pemanfaatan sumber daya hutan dan skema pembagian manfaat ekonomi yang lebih merata di antara pengrajin bambu.

3.4 Tantangan dan Strategi Penguatan Kolaborasi Pentahelix

Berdasarkan pemetaan di atas, sejumlah tantangan utama dapat diidentifikasi dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Tigawasa. Pertama, keterbatasan promosi digital dan jaringan pemasaran menyebabkan produk kerajinan bambu serta potensi wisata budaya belum terjangkau secara optimal oleh pasar wisatawan, sebuah pola yang juga ditemukan pada banyak desa wisata di Buleleng (Ary Widiastini, 2015; Pratiwi et al., 2024). Kedua, belum optimalnya kolaborasi pentahelix, khususnya keterlibatan akademisi, pelaku usaha pariwisata profesional, dan media, menyebabkan proses inovasi, penguatan kapasitas masyarakat, dan promosi destinasi masih berjalan terbatas sehingga potensi budaya dan ekologis yang dimiliki belum sepenuhnya mampu dikonversi menjadi manfaat ekonomi yang lebih luas

(Diwyarthi et al., 2025; Widhiasthini et al., 2025). Selain itu, belum tersedianya indikator dan instrumen pemantauan keberlanjutan yang terstandardisasi juga menyulitkan evaluasi capaian SDGs secara berkala, padahal implementasi SDGs pada tingkat destinasi memerlukan indikator yang kontekstual namun tetap selaras dengan kerangka pengukuran global (Rasoolimanesh et al., 2020; Miller & Torres-Delgado, 2023).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, penguatan kemitraan pentahelix perlu dilakukan melalui pelibatan perguruan tinggi, pelaku usaha, dan media dalam pengembangan produk wisata, pemasaran digital, serta penyusunan indikator keberlanjutan, sebagaimana diterapkan pada desa wisata budaya di Gianyar (Diwyarthi et al., 2025). Di samping itu, pelembagaan aturan adat berbasis Tri Hita Karana ke dalam dokumen perencanaan desa wisata penting dilakukan agar nilai konservasi lingkungan dan pelestarian budaya memiliki landasan formal yang dapat dipantau pencapaiannya secara berkelanjutan (Wiryawan & Ernawati, 2024). Strategi ini perlu didukung dengan pengembangan paket wisata edukatif berbasis kerajinan bambu, hutan adat, dan tradisi Bali Aga serta penguatan modal sosial melalui forum komunikasi antar pemangku kepentingan, mengingat modal sosial terbukti menjadi faktor penting dalam keberhasilan pariwisata berkelanjutan berbasis komunitas (Prayitno et al., 2024; Suyatna et al., 2024).

4. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Wisata Tigawasa telah menginternalisasi sebagian prinsip Sustainable Development Goals melalui praktik-praktik yang berakar pada kearifan lokal *Bali Aga*, khususnya pada Tujuan 8 melalui usaha kerajinan bambu berbasis komunitas, Tujuan 11 melalui pelestarian tata ruang permukiman tradisional, Tujuan 12 melalui pemanfaatan bahan baku lokal secara terbatas dan terikat norma adat, serta Tujuan 15 melalui konservasi hutan adat dan pembatasan pemanfaatan satwa liar. Filosofi *Tri Hita Karana* berperan sebagai kerangka lokal yang menjembatani ketiga dimensi keberlanjutan tersebut, meskipun penerapannya pada level operasional masih memerlukan pelembagaan yang lebih konkret agar tidak berhenti pada tataran simbolik. Tantangan utama yang dihadapi Tigawasa terletak pada dimensi Tujuan 17, yaitu lemahnya kolaborasi *pentahelix* serta minimnya promosi digital dan instrumen pemantauan keberlanjutan yang terstandardisasi. Oleh karena itu, penguatan kemitraan multipihak, pelembagaan aturan adat berbasis *Tri Hita Karana* ke dalam dokumen perencanaan desa wisata, serta pengembangan produk wisata edukatif berbasis otentisitas budaya *Bali Aga* menjadi langkah strategis yang perlu diprioritaskan agar Tigawasa dapat bertransformasi dari status desa wisata berkembang menuju model desa wisata berkelanjutan yang selaras dengan agenda pembangunan global.

Daftar Pustaka

Achmad, W., Chuang, H. M., Gunawan, U. P., Nadila, D., & Maulana, I. (2023). Community empowerment through the development of the Cisaat Tourism Village, Subang Regency. *Ilomata International Journal of Social Science, 4*(1), 30-39. https://doi.org/10.52728/ijss.v4i1.642

Adityanandana, M., & Gerber, J. F. (2019). Post-growth in the tropics? Contestations over Tri Hita Karana and a tourism megaproject in Bali. *Journal of Sustainable Tourism, 27*(12), 1839-1856. https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1666857

Andayani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad, M. (2017). Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata dan implikasinya terhadap ketahanan sosial budaya wilayah (studi di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan*

Nasional, 23(1), 1-16. https://doi.org/10.22146/jkn.18006

Anggana, I. P. S., Mudana, I. G., Triyuni, N. N., & Sukmawati, N. M. R. (2022). Tri Hita Karana as a form of pro-environmental behavior in Bindu Traditional Village. *International Journal of Green Tourism Research and Applications, 4*(1), 30-37. https://doi.org/10.31940/ijogtra.v4i1.30-37

Ardana, P., Suparwata, D., Sudrajat, A., Chatun, S., & Harsono, I. (2024). The role of Bali's traditional subak farming system in the preservation of natural and cultural resources. *West Science Nature and Technology, 2*(1), 31-38. https://doi.org/10.58812/wsnt.v2i04.754

Armiyati, L., Fachrurozi, M. H., Suswandari, S., & Yasa, I. W. P. (2023). Cultural potential of Bali Aga villages to develop tourist in Buleleng Regency, Bali Province. In *Proceedings of the 4th International Conference on Law, Social Sciences, and Education (ICLSSE 2022)*. EAI. https://doi.org/10.4108/eai.28-10-2022.2326377

Ary Widiastini, N. M. (2015). Strategi pemasaran pariwisata di Kabupaten Buleleng, Bali. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1*(1), 1-19. https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v1i1.4492

BPS Provinsi Bali. (2025a). *Perkembangan pariwisata Provinsi Bali Desember 2024* [Siaran pers]. https://bali.bps.go.id/en/pressrelease/2025/02/03/717939/

Dewi, M. H. U. (2013). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara, 3*(2), 117-226. https://doi.org/10.22146/kawistara.3976

Dewi, C. I. R. S., Triyuwono, I., & Hariadi, B. (2024). Corporate social responsibility model based on Tri Hita Karana philosophy. *Cogent Social Sciences, 10*(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2295056

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. (2025). *DLH hadiri rapat koordinasi dan verifikasi lapangan pengajuan hutan adat di Desa Tigawasa* [Berita resmi]. https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/60_dlh-hadiri-rapat-koordinasi-dan-verifikasi-lapangan-pengajuan-hutan-adat-di-desa-tigawasa_2025-07-09-11-53-09

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Buleleng. (2024). *Pelatihan peningkatan branding sentra anyaman bambu Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng* [Berita resmi]. https://disdagperinkopukm.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/33_pelatihan-peningkatan-branding-sentra-anyaman-bambu-desa-tigawasa-kecamatan-banjar-kabupaten-buleleng

Disparda Provinsi Bali. (2024). *Adanya berita 'Bali tak layak dikunjungi 2025', begini penjelasan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali* [Siaran pers]. https://disparda.baliprov.go.id/adanya-berita-bali-tak-layak-dikunjungi-2025-begini-penjelasan-kepala-dinas-pariwisata-provinsi-bali/2024/11/

Diwyarthi, N. D. M. S., Pramana, I. D. P. H., Pratama, I. W. A., Wiartha, N. G. M., & Jata, I. W. (2025). Kolaborasi pentahelix dalam pengelolaan wisata budaya pada desa wisata: Studi kasus Desa Wisata Melinggih Kelod, Payangan. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 8*(3), 81-92. https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i3.4056

Dwiyanti, A. F., Solahudin, D., & Safei, A. A. (2023). Dampak pengembangan

pariwisata di Pantai Cemara Cipanglay terhadap pemberdayaan masyarakat. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 7*(3), 275-296. https://doi.org/10.15575/tamkin.v7i3.18653

Dwyer, L., & Kim, C. (2003). Destination competitiveness: Determinants and indicators. *Current Issues in Tourism, 6*(5), 369-414. https://doi.org/10.1080/13683500308667962

Herlianti, E. V., & Sanjaya, R. B. (2022). Dampak positif pariwisata terhadap budaya, ekonomi, dan lingkungan di Kasepuhan Cipta Mulya. *Kritis, 31*(2), 132-149. https://doi.org/10.24246/kritis.v31i2p132-149

Javlec. (2025). *Pendampingan dan peningkatan kapasitas pengelolaan hutan adat di Bali* [Laporan program]. https://javlec.org/pendampingan-dan-peningkatan-kapasitas-pengelolaan-hutan-adat-di-bali/

Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. (2025). *Verifikasi hutan adat di Kecamatan Banjar: Desa Tigawasa siap penetapan, Cempaga masih proses* [Berita resmi]. https://banjar.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/50_verifikasi-hutan-adat-di-kecamatan-banjar-desa-tigawasa-siap-penetapan-cempaga-masih-proses_2025-07-03-13-55-05

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. (2026). *Tegaskan MHA sebagai penjaga hutan terbaik, Menteri Kehutanan serahkan 10 SK hutan adat dan luncurkan peta jalan percepatan 2025-2029* [Siaran pers No. SP.201/HKLN/06/2026]. https://www.kehutanan.go.id/news/tegaskan-mha-sebagai-penjaga-hutan-terbaik-menteri-kehutanan-serahkan-10-sk-hutan-adat-dan-luncurkan-peta-jalan-percepatan-2025-2029

Loureiro, I. S., Costa, V., & Malheiro, A. (2024). Sustainable tourism: A systematic literature review and bibliometric analysis. *European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, 14*(1), 127-139. https://doi.org/10.2478/ejthr-2024-0009

Miller, G., & Torres-Delgado, A. (2023). Measuring sustainable tourism: A state-of-the-art review of sustainable tourism indicators. *Journal of Sustainable Tourism, 31*(7), 1483-1496. https://doi.org/10.1080/09669582.2023.2213859

Misnan, & Sukma, A. H. (2023). Tri Hita Karana as a Bali tourism communication strategy in preserving tourism cultural destinations. *Review of Politics and Public Policy in Emerging Economies, 5*(1), 45-56. https://doi.org/10.26710/rope.v4i2.2652

Mongabay Indonesia. (2023). *Pura hutan Desa Tigawasa*. https://www.mongabay.co.id/2023/05/10/pura-hutan-desa-tigawasa/

Pratiwi, K. A., Sudarsana, I. M., & Wardana, I. P. M. A. (2024). Membangun konsep niat berkunjung kembali ke desa wisata di Kabupaten Buleleng Bali. *Jurnal Ekonomi, 29*(3), 528-551. https://doi.org/10.24912/je.v29i3.2580

Prayitno, G., Auliah, A., Ari, I. R. D., Dinanti, D., Hayat, A., & Efendi, A. (2024). Social capital for sustainable tourism development in Indonesia. *Cogent Social Sciences, 10*(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2293310

Rahmi, R. (2025). Change in and continuity of traditional village architecture: The Bali Aga village of Tenganan Pegringsingan, Bali, Indonesia. *Built Heritage, 9*(45). https://doi.org/10.1186/s43238-025-00216-w

Rasoolimanesh, S. M., Ramakrishna, S., Hall, C. M., Esfandiar, K., & Seyfi, S. (2020). A systematic scoping review of sustainable tourism indicators in relation to the sustainable development goals. *Journal of Sustainable Tourism, 31*(7), 1497-1517. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1775621

Rideng, I. W., Widyantara, I. M. M., & Arini, D. G. D. (2022). Empowerment of coastal communities in cultural and environmental preservation (Karolahan Traditional Village, West Tianyar, Karangasem). *Law Doctoral Community Service Journal, 1*(1), 8-13. https://doi.org/10.55637/ldcsj.1.1.4450.8-13

Sitohang, L., & Purnomo, N. H. (2023). Local wisdom in the context of sustainable tourism: Two-sided phenomena of Tri Hita Karana in daily tourism activities in Bali. *Jurnal Geografi: Geografi dan Pengajarannya, 21*(1), 1-18. https://doi.org/10.26740/jggp.v21n1.p1-18

Suamba, I. K., Sumiyati, Krisnandika, A. A. K., Tika, I. W., Sulastri, N. N., & Arisena, G. M. K. (2023). The Subak-based agro-tourism management model in the world cultural heritage area of Catur Angga Batukaru Tabanan Regency, Bali Province, Indonesia. *African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development, 23*(2), 22534-22547. https://doi.org/10.18697/ajfand.117.21970

Sugiartawan, P., Sudipa, I., & Wiguna, I. (2022). GDSS development of Bali tourism destinations with AHP and Borda algorithms based on Tri Hita Karana. *IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems), 16*(3), 271-282. https://doi.org/10.22146/ijccs.76605

Suryawan, T. G. A. W. K., Putri, C. I. A. V. N., Geriadi, M. A. D., Dwijayanthi, A. A. I., & Miranti, R. (2024). Tri Hita Karana for environmental resilience: Enhancing coral reef conservation and sustainable practices in Mengiat Beach Bali. *Journal of Community Service and Empowerment, 5*(1), 23-33. https://doi.org/10.22219/jcse.v5i1.29858

Suwasono, A., Asih, D. N., & Sahide, A. (2022). Social values analysis toward ecotourism development in the Kei Islands. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika, 28*(2), 101-111. https://doi.org/10.7226/jtfm.28.2.101

Suyatna, H., Indroyono, P., Yuda, T. K., & Firdaus, R. S. M. (2024). How community-based tourism improves community welfare? A practical case study of "Governing the Commons" in rural Nglanggeran, Indonesia. *International Journal of Community and Social Development, 6*(1), 77-96. https://doi.org/10.1177/25166026231189946

Tarigan, K. I., Agustina, N. K. W., & Wijayanti, N. P. E. (2026). Mindful mobility in Bali: How walking experiences shapes sense of place. *Jurnal Kepariwisataan: Destinasi, Hospitalitas, dan Perjalanan, 10*(1), 58-77. https://doi.org/10.34013/jk.v10i1.2265

Tempo.co. (2025). *Bali targetkan kunjungan wisata 6,5 juta sepanjang 2025*. https://www.tempo.co/hiburan/bali-targetkan-kunjungan-wisata-6-5-juta-sepanjang-2025-1197531

Widhiasthini, N. W., Yanti, N. K. W., Subawa, N. S., Baykal, E., Budiana, I. N., Utami, M. S. M., & Subanda, I. N. (2025). Pentahelix model and Tri Hita Karana for Bali sustainable tourism. *Tourism and Hospitality Research*. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/14673584251340046

Wiryawan, I. W., & Ernawati, N. (2024). Tri Hita Karana in the spatial

planning of Bali Province in national and regional regulations as an environmental conservation effort. *International Journal of Environmental Impacts, 7*(1), 31-40. https://doi.org/10.18280/ijei.070104